

## Lemahnya Koalisi Partai Pendukung Jaro Ade-Inggrid Kansil Pada Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018

Januari Aquarta P<sup>1</sup>, Endang Sulastri<sup>2</sup>, Husni Hasanudin<sup>3</sup>

[januarintm87@gmail.com](mailto:januarintm87@gmail.com)

<sup>1</sup>Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta 15419

<sup>2</sup>Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta 15419

<sup>3</sup>Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta 15419

### Abstrak.

*Dalam Pilkada di Kabupaten tahun 2018, terdapat lima pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan Ade Ruhandi dan Inggrid Kansil diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera Partai Nasdem, PKPI dan Partai Berkarya. Pasangan lainnya Ade Yasin dengan Iwan Setiawan. Namun pasangan yang didukung mayoritas kursi di DPR kalah dalam pilkada Kabupaten Bogor 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kekalahan pasangan Ade Ruhandi dan Inggrid Kansil pada Pilkada 2018. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai Koalisi Partai Politik. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data yang diambil dari wawancara dan studi pustaka.*

**Kata Kunci:** *demokrasi, pilkada, partai politik, koalisi*

### PENDAHULUAN

R. Kartawijaya dalam sebuah karyanya mengatakan bahwa kontestasi pemilihan umum menjadi agenda demokrasi setiap lima tahun sekali untuk memilih dan mengganti anggota eksekutif juga legislatif. Pemilu dijadikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu juga menjadi salah satu tolak ukur seberapa demokratisnya sebuah negara. Sistem pemilu ini dijadikan perangkat untuk mengatur kontestasi perebutan kekuasaan di dalam demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat.<sup>1</sup> Sistem demokrasi di Indonesia, pasca reformasi dilaksanakan sebanyak dua kali, pemilihan calon legislatif sebagai wakil rakyat di parlemen dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Selain dua hal itu, Indonesia juga memberlakukan pemilihan dalam konteks daerah yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam perspektif pembangunan politik, demokrasi politik di tingkat lokal adalah salah satu prioritas pemerintahan reformasi saat ini, kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, membuktikan bahwa pemerintahan Pasca Orde Baru melakukan penataan ulang sistem politik di Indonesia. Leo Agustino,<sup>2</sup> melalui pilkada, merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Bahkan O'Neill<sup>3</sup> menyatakan bahwa, "*all politics is local*" yang dapat diartikan sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dulu. Jadi sangat beralasan ketika demokrasi politik di Indonesia melalui Pilkada langsung merupakan upaya membangun alas demokrasi di level daerah (lokal).

Sejalan dengan di atas, system pemilu atau demokrasi baik tingkat nasional maupun local, perlunya partisipasi kuat dari masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya. Begitupun dalam hal pilkada, menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah partai politik berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> R. Kartawidjaja, Pipit dan M Faishal Aminuddin. *Demokrasi Elektoral: Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu*, (Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2014), hal. 115

<sup>2</sup> Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

<sup>3</sup> *Ibid*

jembatan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, pada tiap kontestasi pemilu, partai politik pasti akan mengusung calon-calon pemimpin pilihannya sesuai dengan kriteria dan syarat yang diajukan masing-masing partai. Ini menggambarkan bahwa peran partai politik sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara.<sup>4</sup> Selain partisipasi masyarakat dan partai politik kandidat kepala daerah memiliki peran penting agar mampu mempengaruhi dan merebut hati masyarakat sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi di tingkat lokal.

Dari aspek perundangan yang berlaku, dengan adanya perubahan undang-undang, salah satunya perubahan undang-undang tentang pemerintahan Nomor 5 Tahun 1974, menjadi undang-undang No. 22 Tahun 1999, dan undang-undang No. 32 Tahun 2004, telah membawa perubahan yang signifikan dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia, dimana pada mulanya Pilkada dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menentukan calon Kepala Daerah, yang nantinya calon tersebut dipilih oleh Pemerintah pusat. Pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999, mulai hilangnya wewenang pemerintah pusat untuk menentukan kepala daerah, DPRD tidak hanya penyelenggara tetapi juga memiliki keputusan untuk menentukan kepala daerah pemerintah pusat hanya sebatas pengesahan. Perubahan terus berlanjut terjadi pada Undang - undang No. 32 Tahun 2004 dimana rakyat berhak memilih secara langsung kepala daerah yang diusung oleh Partai Politik.<sup>5</sup>

Selanjutnya, sebagai sebuah upaya perbaikan pemerintah terus merivisi undang-undang tentang pilkada, sebagai kegiatan politik lokal di daerah

<sup>4</sup> Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia". Dikutip dalam *Jurnal Indonesian Political Science Review*, 2019, hal 224.

<sup>5</sup> DR. H. Nurhamin Nahar Usman (2015), *Percepatan dan Perhambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Halaman 5

dengan undang-undang No. 2 tahun 2011, kemudian direvisi kembali dengan undang-undang No 07/2017 tentang pemilihan umum yang didalamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah.<sup>6</sup> Dalam konteks inilah demokrasi lokal diperlukan, memilih pemimpin daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta mencari pemimpin yang berkualitas, jujur dan jauh dari korupsi.

Dengan demikian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir dan setelahnya akan dipilih kembali secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU selaku instansi penyelenggara Pemilu dalam penyebaran informasi pemilu dalam bentuk kampanye dilakukan melalui sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih. Dari kampanye dapat membuat masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti yang dikemukakan Milbrath bahwa seseorang akan merasa peka dan melibatkan diri dalam kegiatan politik apabila telah mempunyai sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang cukup mengenai politik.<sup>7</sup>

Keberlangsungan Pilkada berlaku diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, begitupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor sudah melaksanakan tiga kali pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada tahun 2008, 2013 dan 2018. Pada pilkada tahun 2008 dimenangkan oleh pasangan Rachmat Yasin dan Karyawan Faturahman yang saat itu diusung oleh PPP dan PDIP, selanjutnya pada pilkada tahun 2013 Rachmat Yasin sebagai *incumbent* kembali terpilih

---

<sup>6</sup> Agus Prasetya, *Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Madiun*, Jurnal Pamator Universitas Terbuka. Volume 11 No 2, Edisi Oktober 2018, hal. 12

<sup>7</sup> Miaz, Y, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi* (UNP Press, 2012)

sebagai bupati bogor dimana pada periode kedua ini rahmat yasin berpasangan dengan Nurhayanti yang berasal dari kalangan birokrat.

Berbeda dengan Pilkada di tahun 2018 muncul sosok-sosok baru yang menjadi calon bupati dan wakil bupati, bahkan pilkada 2018 ini memiliki fenomena yang menarik, karena pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kuat dari sisi dukungan partai politik mengalami kekalahan. Pada umumnya dalam sebuah Pilkada pasangan yang didukung koalisi besar partai politik meraih kemenangan dalam kontestasi. Hal ini disebabkan dengan dukungan koalisi besar terdapat peluang besar akan mendapatkan dukungan suara yang besar dari masyarakat pemilih. Kenyataannya pilkada yang terjadi di Bogor pada tahun 2018 tidak terjadi seperti pada umumnya, jaminan dukungan parpol merupakan jaminan kemenangan kursi eksekutif di daerah namun kenyataannya tidak berbanding lurus.

Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2018 itu sendiri diikuti oleh lima pasangan calon, tiga pasangan diusung oleh koalisi partai politik dan dua pasangan calon dari jalur independen. Sedangkan pasangan Ade Ruhandi dan Ingrid Maria Palupi Kansil, mendapat nomor urut tiga, diusung oleh lima partai yang memiliki kursi di DPRD dengan total raihan kursi terbanyak diantara calon lainnya. Partai yang mengusung pasangan Jaro Ade dan Ingrid diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera Partai Nasdem, PKPI dan Partai Berkarya.<sup>8</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Partai Politik

---

<sup>8</sup> Pikiran-rakyat.com,(2008). *Jaro Ade Ingrid Kansil Koleksi Kursi Terbanyak*. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01292128/jaro-ade-inggrid-kansil-koleksi-kursi-terbanyak-417644>. Diakses 10 Agustus 2022

Ada beberapa definisi tentang partai politik yang dikemukakan oleh ilmuwan politik diantaranya, Carl Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok masyarakat yang terorganisir dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Alan Ware dalam bukunya partai politik dan system partai mengungkapkan, dalam suatu dinamika politik di negara modern keberadaan partai politik adalah suatu keniscayaan, bahkan baginya keberadaan partai politik penting karena merupakan institusi yang membawa rakyat mencapai tujuan bersama dengan cara menjalankan kekuasaan di dalam negara. Ware mendefinisikan partai politik adalah sebuah institusi yang mencari pengaruh dalam sebuah negara dengan cara merebut posisi-posisi di pemerintahan dan membawa lebih dari suatu kepentingan di masyarakat serta berusaha mengagregasi kepentingan-kepentingan tersebut. "A political party is an institution that (a) seeks influence in a state, often by attempting to occupy positions in government, and (b) usually consists of more than a single interest in the society and so to some degree attempts to 'aggregate interests'.

Sementara itu dalam bukunya Miriam Budiardjo Dasar - Dasar Ilmu Politik Partai politik diartikan secara umum merupakan kelompok yang terorganisir yang setiap anggotanya memiliki orientasi, nilai - nilai dan tujuan yang sama, baik itu cita - cita maupun, tujuan politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan dengan konstitusional untuk melaksanakan agenda Partainya. Dalam konteks pemilu disitulah partai politik dapat menampilkan calonnya untuk dipilih oleh rakyat yang nantinya mengisi pemerintahan yang siap memperjuangkan agenda - agenda kerakyatan yang sudah disusun oleh partai politiknya.

#### 1) Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menurut G.B. de Huszar dan T.A. Stevenson :

- a) Pengajuan calon-calon wakil rakyat (Proposing candidates)
- b) Merangsang pendapat umum (Stimulating public opinion)
- c) Mendorong rakyat untuk memilih (Getting people to vote)
- d) Sikap kritis terhadap pemerintahan (Criticism of the regime)
- e) Tanggung jawab pemerintahan (Responsibility for government)
- f) Memilih para pejabat negara (Choosing appointive officer)
- g) Kesatuan dalam pemerintahan (Unifying the government)

Fungsi Partai Politik menurut Maurice Duverger:

- 1) Pendidikan politik (Political education)
  - a) Seleksi politik (Political selection)
  - b) Penghimpunan (kegiatan) politik (political aggregation)
  - c) Saluran pernyataan kepentingan (Interest articulation)
  - d) Pengawasan/ pengendalian politik (Political control)
  - e) Komunikasi politik (Political communication)

Menurut Samuel P. Huntington, Kelembagaan merupakan proses di mana organisasi dan tatacara memperoleh nilai baku dan stabil. Nilai dan stabilitas yang dimaksud ini mewujudkan dalam pemantapan perilaku, sikap atau budaya dalam organisasi. Sementara itu Ramlan Surbakti memberikan pengertian bahwa pelembagaan partai politik sebagai suatu proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya.

Dalam konsep kelembagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasand terdapat empat aspek untuk menilai kelembagaan partai politik, di antaranya yaitu dengan melihat aspek sistem, nilai, keotonomian dan citra publik dari partai politik tersebut. Aspek sistem, dimana partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman apabila partai politik

melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif.

Di Indonesia sendiri derajat kesisteman dalam partai politik yang ada pada saat ini sangat rendah, bekerjanya suatu partai tidak dapat dilihat dari AD/ART partai politik tersebut saja karena pada tataran empiris kadang tidak sejalan antara azaz, platform partai dengan perilaku elit, pemilih, serta program-program partai, menunjukkan bahwa partai politik yang ada pada saat ini belum melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut. Aspek Nilai/ Identitas nilai partai politik, sebuah aspek yang didasarkan pada ideologi atau platform partai.

Namun, jika melihat kondisi di Indonesia saat ini tidak terlihat jelas perbedaan partai politik, terjadi pergeseran ideologi, dimana tidak ada perbedaan yang ekstrim antar partai politik. Aspek Otonomi, dimana keputusan partai politik sarat sarat dengan hasil negosiasi lingkaran elit politik di level pusat dan bukan ditentukan oleh suara dan kepentingan para pendukungnya. Bahkan, partai politik kental dengan kultur feodal, dan meluas tindakan pragmatis yang membenarkan segala cara, suburnya dinasti politik. Aspek Citra publik, pengetahuan publik tentang partai politik saat ini pada umumnya hanya sebatas pengetahuan tentang tokoh yang menjadi figure central di dalam partai politik tersebut. Partai politik baru mampu menanamkan citra partainya kepada masyarakat melalui serangkaian simbol-simbol kepartaian saja misalnya warna atau gambar partai, bukan pada visi misi yang dibawa oleh partai tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Novi Winarti, Nazaki (2019), *Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi*. Kemudi, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4 No.1, Edisi Agustus. Hal 118

Koalisi merupakan keadaan di mana sekelompok orang atau organisasi bersepakat untuk bekerja sama mewujudkan sebuah tujuan atau idealisme. Meski sepakat untuk bekerja sama, koalisi pada dasarnya tidak mengharuskan mereka yang bersepakat itu untuk saling meleburkan diri, untuk kemudian menjelma menjadi sebuah institusi yang baru. Selain ketiadaan peleburan, koalisi ini umumnya bersifat sementara saja atau temporer, yang dilandasi oleh semangat utilitarianisme atau asas kebermanfaatan, dengan kata lain, tidak dibangun untuk membentuk sebuah kerjasama yang permanen, sebab manakala tujuan yang bersifat kebermanfaatan itu telah tercapai bisa saja koalisi itu membubarkan diri.

Dalam prakteknya, koalisi dapat terjadi dalam domain non-politik atau non-pemerintahan. Untuk itu, kita biasa temui beberapa koalisi yang ditujukan untuk kepentingan sosial, budaya, lingkungan, ekonomi atau kemanusiaan. Dalam suatu Negara yang menganut system multi partai, koalisi partai politik merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi, pada umumnya koalisi partai politik lahir untuk menghadapi kekuatan politik yang lebih besar.

Dalam teori pilihan-rasional ada dua pendekatan yang menjelaskan mengapa partai-partai politik melakukan koalisi, yaitu office-seeking dan policy-seeking. Office seeking menjelaskan bahwa koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapat kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Mereka merumuskan strategi pencapaian kekuasaan tersebut melalui formulasi minimalis yang biasa disebut sebagai Minimal Winning Coalition (WMC). Untuk mencapai posisi mayoritas cukup menguasai separuh kursi di parlemen plus satu, dengan target utamanya adalah koalisi dengan partai-partai yang memiliki kursi besar, dan tidak merasa perlu untuk melibatkan partai kecil.

Dengan tujuan utama partai-partai politik besar adalah menjaga kepentingan mereka dengan tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan platform politik, berkoalisi untuk melanggengkan kepentingan mereka bersama agar tetap berkuasa. Sedangkan pendekatan policy seeking lebih menitikberatkan bahwa partai politik memang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan akan tetapi dalam derajat tertentu juga harus mempertimbangkan tercapainya tujuan yang lebih esensial yaitu tercapainya cita-cita yang lebih ideal dalam bentuk kebijakan (policy), tujuan koalisi kepada sesuatu yang lebih ideal. Maka, basis pembentukan koalisi adalah ideology, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu platform politik. Kesamaan platform politik ini lah yang kemudian dapat menggabungkan partai politik kedalam sebuah koalisi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai alat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Sedangkan fokus penelitian diarahkan pada realitas sosial politik yang berlangsung terhadap obyek yang diteliti sehingga penelitian ini memandang individu, organisasi dan institusi dalam merespon perubahan politik. Jenis penelitian ini bersifat studi analisis proses dialektika politik dengan membatasi obyek penelitian pada saat proses Pilkada Kabupaten Bogor berlangsung tahun 2018 dalam merespon untuk memperoleh hasil penelitian empiris dan komprehensif melalui pendekatan analisis deskriptif.

Proses penelitian yang akan dilakukan melalui wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, mengumpulkan berbagai data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dari yang bersifat khusus ke

umum, dan menafsirkan data-data yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.

Penelitian kualitatif yang penulis gunakan menurut Denzin dan Lincoln yaitu menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya berusaha memahami, atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut. Metode studi kasus adalah suatu eksplorasi atas sebuah "*bounded system*" atau sebuah kasus (atau banyak kasus) pada kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data mendalam secara terperinci, melibatkan sumber-sumber informasi yang kaya dalam konteks.<sup>10</sup>

Kemudian, dalam studi kasus yang terjadi, peneliti lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa kontemporer, bila peristiwa yang bersangkutan tidak dapat dimanipulasi. Studi kasus merupakan suatu strategi penelitian yang menonjolkan topik "keputusan" sebagai fokus utamanya. Sejalan dengan itu topik-topik lain juga ditemukan, mencakup organisasi, proses, program, lingkungan institusi, dan bahkan peristiwa. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata dan memanfaatkan bukti dari multisumber.

Teknik yang digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dan terstruktur akan dipandu oleh sebuah panduan wawancara, menyajikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang terstruktur.

Diharapkan dengan wawancara mendalam menjadikan informan mampu menceritakan kisah mereka sendiri secara lebih terbuka dan apa adanya. Sudut pandang mereka menjadi bagian yang penting dan Wawancara

---

<sup>10</sup> McCarty, E. Doyle, *Knowledge as Culture: the New Sociology of Knowledge*, (London & New York, Routledge, 1996)

dengan beragam narasumber diharapkan juga sebagai uji validitas data hasil wawancara.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pilkada Kabupaten Bogor

Secara geografis Kabupaten Bogor memiliki letak yang sangat strategis karena berdekatan dengan DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Bogor menjadi daerah penyangga ibu kota. Kabupaten Bogor memiliki keunggulan pada potensi alam, dimana potensi ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan pariwisata. Dalam bidang pertanian, komoditi unggulan Kabupaten Bogor berupa tanaman pangan dan hortikultura, seperti nanas gati, talas, pisang raja bulu, dan manggis raya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor tahun 2021 mencapai 70,60, meningkat 0,20 poin (0,28 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (70,40). Selama 2010-2021, IPM Kabupaten Bogor rata-rata meningkat sebesar 0,85 persen. Peningkatan IPM Kabupaten Bogor yang terjadi pada tahun 2021 seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan). Namun, belum mencapai level yang sama di tahun 2019, kondisi sebelum adanya pandemi covid-19. IPM Kabupaten Bogor menempati peringkat 16 se-provinsi Jawa Barat dengan status pembangunan berada pada level "tinggi".

Sementara itu, Penduduk usia kerja di Kabupaten Bogor Agustus 2020 sebanyak 4,36 juta orang meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 4,27 juta orang. Namun sebaliknya jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) mengalami penurunan dimana di Agustus tahun 2020 sebesar

2,73 juta orang dari tahun 2019 yang mencapai 2,79 juta orang. Penduduk miskin di Kabupaten Bogor secara persentase berfluktuatif nilainya, akan tetapi menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2010-2019.

Kabupaten Bogor merupakan wilayah bagian dari provinsi Jawa Barat yang secara administratif memiliki 40 kecamatan,<sup>11</sup> 19 kelurahan dan 416 desa. Dengan tipe morfologi wilayah yang cukup beragam, dari daratan yang relatif rendah di wilayah utara hingga dataran tinggi di wilayah selatan. Semula, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor berada di Panaragan (sekarang menjadi wilayah kota Bogor). namun, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1982, ibu kota Kabupaten Bogor dipindah di Cibinong seiring dengan pemekaran wilayah kota Bogor.

Kecamatan di Kabupaten Bogor - Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi [Jawa Barat](#), dengan Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Cibinong yang berada di sebelah utara Kota Bogor. Batas wilayahnya meliputi: sebelah utara (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi); sebelah timur (Kabupaten Karawang), sebelah tenggara (Kabupaten Cianjur), sebelah selatan (Kabupaten Sukabumi) dan mengelilingi wilayah Kota Bogor.

Dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bogor yang secara langsung sudah terselenggara tiga kali, terlihat antusias masyarakat untuk mengikuti kontestasi sebagai calon kepala daerah cukup tinggi, dimana hampir setiap periode pemilihan langsung diikuti lebih dari 2 pasangan calon, pada tahun 2008 pertama kali Pilkada langsung diselenggarakan di Kabupaten Bogor diikuti oleh lima pasangan, yakni pasangan Iyus Djuher - HM. Rusdi, Maman Daning - HM. Nurdin, H. Tb. Soemanjaya - Ace Supeli, Fitri Putra Nugraha -

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Perda No. 40 Tahun 2004 Tentang OTK Kecamatan Kabupaten Bogor Memiliki 40 Kecamatan. <https://bogorkab.go.id/kecamatan/>

Endang Kosasih dan Racmat Yasin - Karyawan Faturahman. Pilkada yang berlangsung dua putaran tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Rachmat Yasin - Karyawan Faturahman yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI Perjuangan.

Sedangkan, periode 2013 diikuti oleh empat pasangan calon yaitu H. Gunawan Hasan - HM. Muhammad Akri, Alex Sandi R - Hengky Tornado, H. Rachmat Yasin - HJ. Nurhayanti dan H. Karyawan Faturahman - Adrian A.K. dimenangkan oleh incumbent Rahmat Yasin yang berpasangan dengan mantan birokrat dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris daerah Nurhayanti dan 2018 di ikuti lima pasangan calon terdiri dari tiga pasangan yang diusung oleh partai politik yakni pasangan Ade Yasin - Iwan Setiawan, Jaro Ade Inggrid Kansil dan Fitri Putra Nugraha dan Bayu Syahjohan, dan dua pasangan diusung melalui jalur independen atau perseorangan yakni Ade Wardhana - Asep Ruhiyat dan Gunawan Hasan - Fiki Rhoma. Pilkada 2018 pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Ade Yasin - Iwan Setiawan.

**Tabel. 1**  
**Kandidat Pasangan dan Partai Pengusung**  
**Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018**

No Urut	Pasangan	Partai Pengusung
1	Fitri P. Nugraha - Bayu Sahjohan	PDIP, Hanura
2	Ade Yasin - Iwan Setiawan	PPP, Gerindra, PKB
3	Jaro Ade - Inggrid Kansil	Golkar, PKS, PAN, NASDEM, Demokrat



4	<b>Gunawan Hasan - Ficky Irama</b>	<b>Independent</b>
5	<b>Ade Wardhana - Asep Ruhayat</b>	<b>Independent</b>

Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 memiliki 7635 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 435 desa dan kelurahan, dengan Jumlah pemilih Pilkada adalah 3.294.825, pemilih laki - laki 1.688.275 dan pemilih perempuan 1.606.550.

Sebagai wilayah yang memiliki Jumlah penduduk dan pemilih terbanyak dalam Pilkada, tentunya tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap proses Pilkada, namun dari tiga periode Pilkada di Kabupaten Bogor berlangsung relatif aman dan damai. Meski pada Pilkada 2018, salah satu pasangan calon sempat melakukan gugatan sengketa hasil ke mahkamah konstitusi walaupun pada akhirnya gugatan tersebut ditolak.

### **Dinamika Pencalonan**

Dinamika politik dalam peroses pencalonan Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 sangat dinamis terutama menjelang pendaftaran, salah satu diantaranya yang paling menarik adalah pasangan Jaro Ade - Ingrid Kansil, Jaro Ade yang sebelumnya digadang- gadang akan berpasangan dengan Arif Abdi ketua DPD PAN Kabupaten Bogor<sup>12</sup>, dimana DPP PAN Saat itu sudah mengeluarkan surat keputusan kepada Arif Abdi untuk berpasangan dengan Jaro Ade, begitupun Jaro Ade surat keputusan DPP sudah ditanda tangani oleh Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris jendral Partai Golkar, namun semuanya

<sup>12</sup> <https://www.radarbogor.id/2017/10/02/jaro-ade-arif-abdi-semakin-dekat/> diakses 3 Januari 2023

berubah tak kala terjadi pergantian ketua umum DPP Partai Golkar yang saat itu setya Novato karena terlibat kasus korupsi dan akhirnya digantikan oleh Airlangga Hartarto. pada akhirnya keputusan dewan pimpinan pusat DPP Partai Golkar menetapkan Inggird kansil untuk menjadi wakilnya. Penetapan inggird kasil pun banyak mendapat sorotan cukup negtif terutama dalam internal Partai Golkar Kabupaten Bogor, dimana Inggird Kansil dianggap sosok yang sangat baru belum mengakar dan meski seorang arits inggird kansil dianggap tidak cukup dikenal dikalangan masyarakat Bogor.

Selain pasangan Jaro Ade - Inggird, Sebelumnya menjelang pencalonan sudah banyak calon yang bermunculan terutama melalui jalur Independen, salah satu yang sempat ramai di media adalah Mayor Afif Juwaeni , tentara aktif yang mengundurkan diri dari dunia militer untuk terjun ke politik dengan dukungan organisasi yang dibentuknya BARA AFI (barisan rakyat anti fiktif).

Walau pada akhirnya gagal maju sebagai calon, secara resmi Mayor Afif berama organisasi yang digagasnya menyatakan dukugan kepada pasangan Jaro Ade Inggird Kansil.

Bakal Calon independen lainnya pasangan Dalemunte dan Ade umar yang juga gagal lolos verifikasi untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan, lebih menarik lagi pasangan tersebut sempat melakukan gugatan sengketa ke bawaslu . Setidaknya dalam proses pra pencalonan menurut ketua KPUD saat itu ada sekitar 10 bakal calon independen yang sudah berkonsultasi untuk maju pilkada.Tepatnya tanggal 8 hingga 10 januari 2018 lalu, KPUD Kabupaten Bogor membuka pendaftan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Seperti diketahui terdapat lima pasangan calon yang resmi medaftar dan lolos verifikasi, yaitu pasangan Ade Ruhandi - Ingrid Kansil dengan Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem, PAN, PKPI, Ade Yasin-Iwan Setiawan didukung PPP, Gerindra, PKB, Fitri Putra Nugraha-Bayu Syah

Johan diusung PDI Perjuangan dan Hanura. Ade Wardhana -Asep Ruhiyat dan Gunawan Hasan- Ficky Rhoma, melalui jalur independen.

Jika kita lihat dari kekuatan dukungan berdasarkan perolehan kursi di DPRD Pasangan Jaro Ade - Ingrid Kansil, mendapat dukungan yang paling tinggi, dimana partai Golkar 9 kursi (pemenang pemilu 2014), Demokrat 4 kursi, PKS 5 kursi, PAN 3 kursi, Nasdem 3 Kursi dengan total 24 kursi. Sementara Ade Yasin - Iwan Setiawan diusung oleh Partai PPP, Gerindra dan PKB, dimana PPP sebagai partai pengusung merupakan partai yang dua kali meloloskan kadernya sebagai pemenang pada Pilkada 2008 dan 2013 PPP berhasil mengusung Rachmat Yasin sebagai Bupati Bogor yang pada akhirnya terpilih hingga dua periode. Kekuatan dukungan didprd pun pada Pilkada 2018 cukup tinggi PPP 7 kursi, Gerindra 6 Kursi dan PKB 3 Kursi dengan total 17 kursi.

Sementara pasangan Nungki - Bayu Sahjohan yang diusung oleh PDIP dan Hanura mendapat dukungan jumlah kursi DPRD dengan PDIP 7 kursi, Hanura 3 kursi total 10 kursi, kehadiran nungki ini cukup menarik karean secara historis Nungki merupakan mantan ketua DPD Golkar pada periode 2005 - 2009 yang saat itu me musdalubkan ketua DPD Golkar sebelumnya H. Rusdi dan sempat mencalonkan Bupati Bogor pada pilkada 2008 yang diusung oleh partai Golkar.

Kekuatan dua calon independent pun tidak kalah menarik dimana Ade Wardana yang berpasangan dengan Asep Rukhiyat merupakan ketua Partai Perindo Propinsi Jawa Barat pada saat itu, dan Asep Rukhiyat merupakan Pensiunan ASN dengan jabatan terakhir sebagai kepala Dinas di Kabupaten Bogor. Sementara pasangan independen Gunawan Hasan yang berpasangan dengan fiki Rhoma merupakan pengusaha yang sebelumnya juga pernah

mencalonkan melalui jalur independen pada Pilkada 2013 dan seperti kita tahu fiki rhoma merupakan artis anak dari penyanyi kondang Rhoma Irama.

### **Lemahnya Koalisi Partai Politik**

Secara dukungan partai politik pasangan Jaro Ade dan Ingrid Kansil tentunya memiliki dukungan partai politik terbanyak, begitupun jika diakumulasi dengan perolehan kursi di DPRD. Namun, dalam prakteknya dukungan koalisi partai yang besar tersebut tidak berbanding lurus dengan kemenangan pasangan Jaro Ade - Ingrid Kansil, salah satu yang menjadi penyebab kekalahan tersebut adalah lemahnya koalisi partai politik pendukung Jaro Ade Ingrid Kansil dan adanya tarik ulur kepentingan elit, diantara lemahnya itu yang paling menonjol dalam soal penentuan wakil atau pasangan. Ingrid Kansil dianggap bukan sosok pilihan yang tepat sebagai calon wakil dari Jaro Ade.

Jaro Ade dalam wawancaranya mengatakan:

*Kalau saya rasakan dari pemilu ke pemilu karena kita pernah menjadi tim sukses, melihat dari sisi koalisi yang kita bangun jujur Ditingkatan level atas sama menengah itu sudah cukup maksimal karena selalu bersama, namun ditingkat bawah ada beberapa trable, dari koalisi yang kita bangun ada saja beberapa diwilayah, pengurus partai ditingkat desa kurang maksimal, bukan berarti dalam bekerja, sehingga ada saja didesa misalnya pengurus partai yang mestinya ada 10 ternyata efektif hanya ada lima itu jugakan cukup mempengaruhi kinerja koalisi.*

Lebih dalam lagi Arman Salam Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Periode 2015 - 2020 dalam wawancaranya memaparkan terkait penunjukan Inggri Kasil yang menurutnya tidak memenuhi beberapa unsur penting yang menjadi prasyarat seseorang layak calon wakil bupati :

*" Karena di banyak pertarungan seharusnya peran wakil itu cukup penting, bahkan jika dikategorikan peran wakil secara normatif ada 4, pertama peran wakil sebagai gate foter atau sebagai magnet pemilih, calon wakil yang memiliki kategori sebagai tokoh atau figure disuatu wilayah atau ditengah masyarakat, sehingga mendapat tambahan dukungan dengan adanya wakil bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pasangan. Kedua, dalam memilih wakil kita mempertimbangkan adalah variable perahu*

*suka tidak suka mau tidak mau seorang calon harus diusung oleh partai, biasanya calon - calon potensial belum mencukupi, sehingga wakil membawa perahu atau partai untuk memenuhi syarat pencalonan. Ketiga, untuk memilih wakil dilihat dari dukungan finansial, biasanya akan terkait beban kampanye akan dipikul bersama, ada komunikasi – komunikasi politik terkait alokasi anggaran. Keempat, adalah terkait dengan pertimbangan primordial contohnya kayak laki laki perempuan, kalau dipilpres kita bisa mengenal istilah jawa dan non jawa.*

*Empat hal ini lah yang dijadikan landasan untuk menentukan calon. Kemudian, kenapa pada akhirnya inggrid kansil, memang selain ada 4 faktor normatif tersebut ada faktor kepentingan elit yang menjadi faktor penentu, sejujurnya bisa dikatakan pasangan jaro ade kemaren itu kawin paksa, istilahnya pacarannya dengan siapa kawinnya dengan siapa, inggrid itu adalah pasangan yang dipaksakan”.*

Lebih lanjut Arman juga mengatakan:

*“Disisi lain juga ada transaksi, ada kepentingan yang lebih makro, berkenaan dengan kebijakan kebijakan koalisi dipusat. jadi sebenarnya kalau bicara inggrid Kansil, jika dianalisa berdasarkan kriteia penentuan wakil yang 4 tadi, sebenarnya satu pun tidak ada yang masuk, inggrid kansil secara figure tidak memiliki basis, tidak memiliki finansial yang cukup, kemudian dari sisi pertimbangan primordial jika pun masuk kriteria, tapi bogor ini kan tidak ekstrim, faktor primordial itu untuk wilayah – wilayah yang ekstrim. Terakhir berkenaan dengan perahu tadi, jaro ade dengan Golkarnya dan koalisi beberpa partai yang lain sebenarnya sudah sudah cukup gemuk”.*

Sementara, berbagai pengalaman mengatakan bahwa dalam konteks Pilkada faktor figure lebih utama, meski tentunya dukungan parpol ada pengaruhnya.

Tetapi, pengaruh yang lebih signifikan adalah figure itu sendiri. Terlebih, fakta dilapangan pengurus partai bukan memiliki panatisme yang tinggi terhadap calon, semata mata lebih untuk kepentingan pragmatis, mungkin fenomena ini tidak hanya dibogor saja, juga terjadi di seluruh Indonesia, sehingga dukungan parpol yang besar ini, tidak bisa diandalkan kecuali calon memiliki finansial yang luarbiasa. Artinya, menang kalahnya calon kecil pengaruhnya terhadap gemuk atau kurusnya partai koalisi.

Terlebih juga bisa dilihat, bahwa dukungan parpol itu bukan hal yang gratis, Pasangan Jaro Ade – Inggrid juga banyak mengeluarkan mahar baik berupa janji politik maupun nominal uang, mahar - mahar biasanya

berbandinga lurus dengan jumlah kursi, bahkan terkait dukungan terhadap pasangan Jaro Ade - Ingrid Kansil, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Arman Salam ada yang sampai mengeluarkan satu milyar untuk satu partai tertentu agar mau berkoalisi.

*“ Kita banyak mengeluarkan mahar baik janji politik maupun nominal uang, mahar - mahar biasanya berbandinga lurus dengan jumlah kursi, mahar tidak melulu dengan bentuk rupiah, bisa dengan bentuk jabatan kekuasaan, ada partai tertentu yang sampai 1 milyar kemarin untuk satu partai”. ( Wawancara Arman Salam)*

Disi lain dalam menentukan wakil yang menjadi pasangan calon dari Jaro Ade memang nuansa kepentingan elit sangat terasa, karena penunjukan Ingrid Kansil untuk menjadi wakil Jaro Ade terkesan dadakan dan tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Hal ini cukup di amini oleh Jaro Ade sendiri, seperti dalam wawancara dengannya, Jaro Ade mengatakan penentuan Ingrid sebagai wakil merupakan hal yang dadakan langsung muncul melalui rekomendasi.

*“Bicara pengalaman Pilkada tentang pasangan bupati dan wakil bupati kalau secara pribadi jujur kita sampaikan itu tidak sesuai dengan harapan karena harapan yang diinginkan oleh saya sendiri adalah berangkat dari faktor survey, tidak pernah ketemu, tidak pernah pertemuan tiba-tiba muncul dalam rekomendasi”. ( Wawancara Jaro Ade Calon Bupati)*

Seperti diketahui bahwa sebelum keluarnya rekomendasi dari DPP Partai Golkar yang menunjuk Jaro Ade berpasangan dengan Ingrid Kansil, sudah beredar luas dimedia dan masyarakat Jaro Ade akan berpasangan dengan Arif Abdi ketua DPD PAN Kabupaten Bogor, bahkan kemesraan mereka sudah terlihat karena kerap turun bersama ditengah-tengah masyarakat.

Bahkan, DPP PAN saat itu secara resmi sudah mengeluarkan rekomendasi yang menunjuk Jaro Ade dan Arif Abdi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh PAN.

*“ Pada waktu itu saya sudah bicara 4 mata oleh jaro ade, sudah sepakat. Walaupun memang secara legal SK nya memang belum kelihatan, tapi untuk saya sendiri sudah mempunyai SK dari DPP PAN yang menunjuk saya sebagai wakil untuk Jaro Ade pada waktu itu . Untuk digolkar sendiri katanya sudah ditanda tangani oleh pa idrus Marham, nah, setelah itu kejadian ketua Golkar yang lama itu, tapi akhirnya SK nya berubah menjadi Ingrid”. (Arif Abdi Ketua DPD PAN Kab. Bogor).*

Arif Abdi juga menambahkan pasca penentuan pasangan ini yang lebih intens komunikasi adalah Golkar dengan demokratnya yang merupakan pengusung dari Ingrid Kansil, bahkan ia menilainya ada ketidak seimbangan kinerja antara Jaro Ade dengan Ingrid.

*“Setelah adanya pasangan ini otomatis yang lebih berkomunikasi saat itu antar calon, ini antara Golkar dan demokratnya, kita hanya mendorong mereka supaya jadi. Memang kalau kita lihat kinerjanya kurang seimbang, kebanyakan Golkar Lebih banyak bekerja jaro adanya, mungkin juga pada saat itu masyarakat baru mengenal Ingrid, jauh orang sudah mengenal Jaro Ade”.*

Ketidaktepatan dalam penentuan pasangan ini pun disampaikan juga oleh Yusfitriadi Pengamat Politik Kabupaten Bogor, Menurutnya salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan Jaro Ade adalah salah memilih pasangan.

*“Bagi saya kemaren kenapa kemudian kalah karena salah memilih pasangan, karena artis tidak akan pernah menang di Bogor, tidak ada presidennya, dan bukan kali ini aja artis, sudah beberapa kali tidak pernah menang, itu yang saya sarankan kepada jaro ade ambil saja tokoh lokal, apalagi artisnya bukan sekelas Rafi Ahmad, artisnya Ingrid itu siapa masyarakat tidak ada yang kenal Ingrid, nah disitu menurut saya”.* (Pengamat Politik Yusfitriadi)

Senada dengan itu Aldi Supriyadi Ketua Kelompok Wartawan (Pokwan) Kabupaten Bogor mengatakan koalisi partai pendukung Jaro Ade - Ingrid memiliki kinerja yang tidak maksimal dan Jaro Ade sebagai calon bupati salah dalam memilih wakil.

*“Kinerjanya buruk, bukan hanya itu tapi juga berbicara popularitas, kalau saya katakan jaro ade salah memilih wakil mungkin itu salah satu penyebab kekalahan, karena secara popularitas Jaro Ade sangat tinggi, saat itu juga sebagai ketua DPRD, tapi ketika salah memilih pendamping yang tidak mengenal Bogor, keinginan masyarakat Bogor, apalagi*

isu tentang wakil sendiri inggrid tidak begitu populer dibogor, apalagi sisi baiknya tidak pernah muncul malah sisi jeleknya yang muncul pada kasus dibogor, jadi masyarakat enggan, coba cari tokoh yang ngerti bogor untuk wakilnya”

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan hasil penelitian, pembahasan dan analisa dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan Koalisi partai yang besar tidak menjamin kemenangan satu pasangan calon, terlebih penyebab kekalahan pasangan Jaro Ade dan Inggrid Kansil adalah faktor peran partai koalisi, pertama ketidaktepatan dalam penentuan pasangan yakni Inggrid Kansil sebagai calon wakil bupati, Inggrid kansil yang diusung oleh partai demokrat tidak mampu ikut mendongkrak suara untuk kemenangan pasangan tersebut secara maksimal, dan penentuan pasangan yang terkesan dadakan oleh dewan pimpinan pusat partai Golkar mengindikasikan adanya kepentingan elit di tingkat pusat, sementara Jaro Ade sudah intens bersosialisasi berpasangan dengan calon lain, sehingga dengan munculnya Inggrid Kansil sosialisasi harus kembali mulai dari awal dan kedua meski struktur partai koalisi pendukung pasangan Jaro Ade dan Inggrid Kansil di tingkat kabupaten terdapat keharmonisan dan penunjukan kinerja yang baik, namun kinerja itu tidak merata masif hingga ke struktur tingkat bawah dalam hal ini tingkat desa/kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- R. Kartawidjaja, Pipit dan M Faishal Aminuddin. *Demokrasi Elektoral: Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu*, (Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2014)
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia”. Dikutip dalam *Jurnal Indonesian Political Science Review*, 2019.
- DR. H. Nurhamin Nahar Usman (2015), *Percepatan dan Perhambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Prof. Miriam Budiardjo (2008), *Dasar – dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Agus Prasetya, *Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Madiun*, Jurnal Pamator Universitas Terbuka. Volume 11 No 2, Edisi Oktober 2018
- Miaz, Y, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi* (UNP Press, 2012)
- McCarty, E. Doyle, *Knowledge as Culture: the New Sociology of Knowledge*, (London & New York, Routledge, 1996)
- Tri Isdinarmiarti, S.ST, SE, MSi (2020), *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor*, Bogor: BPS Kabupaten Bogor, 2020.
- Novi Winarti, Nazaki (2019), *Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi*. Kemudi, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4 No.1 , Edisi Agustus.